

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**

Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

**OLEH****APRIZA SAPITRI**  
**NIM. 02170623743****PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**Nama** : APRIZA SAPITRI  
**Nim** : 02170623743  
**Program Studi** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Judul Tugas Akhir** : KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pekanbaru, 07 Mei 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

  
**Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak**  
**NIP.19751129 200801 1 009**

MENGETAHUI

KETUA PRODI

  
**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
**NIP.19790911 201101 1 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



  
**Dr. Hi. M. M. M. M.**  
**NIP.19700826 199903 2 001**

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : APRIZA SAPITRI  
**NIM** : 02170623743  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
**TANGGAL UJIAN** : 7 MEI 2024

Tim Penguji

**Ketua**

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA**

**NIP. 19790911 201101 1 003**

**Sekretaris**

**Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak**

**NIP. 19940523 202203 2 004**

**Penguji I**

**Dr. Muhammad April, S.H., M.H**

**NIP. 198604052023211018**

**Penguji II**

**Muslim, S.Sos., M.Si**

**NIP. 19820205 201503 1 002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRILIA SAPITRI

Nim : 02170623743

Tempat/Tanggal Lahir : Tambak, 01 APRIL 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D3 Administrasi Perpalakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Kontribusi: Pandapatan Pakak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan  
Pandapatan Asli Daerah Kabupaten Pedalawan Pada Badan  
Pengelolaan Kawasan Dan Asal Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2021.....

Yang membuat pernyataan



NIM : 02170623743

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal-hal yang dilarang dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Hak cipta dilindungi undang-undang.

2. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

3. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

4. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

5. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

6. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

7. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

8. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

9. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

10. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

11. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

12. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

13. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

14. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

15. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

16. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

17. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

18. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

19. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

20. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

21. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

22. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

23. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

24. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

25. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

26. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

27. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

28. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

29. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

30. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Oleh:

**APRIZA SAPITRI**  
**NIM. 02170623743**

*Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2023 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pelalawan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan selama 3 tahun atau periode 2020-2022 dari segi realisasi. Untuk realisasi penerimaan PBB pada tahun 2020 ialah sebesar 17,9 M, ditahun 2021 terjadi lagi kenaikan dengan jumlah realisasi PBB sebesar 20,1 M, kemudian kenaikan ini terjadi lagi pada tahun 2022 dimana realisasi penerimaan PBB berjumlah 22,6 M. Penulis Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah disetiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan ialah sebesar 26,44%, ditahun 2021 sebesar 26,15%, kemudian penurunan tersebut berlanjut ditahun 2022, dimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 20,14 %. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang lalai akan kewajibannya untuk membayar pajak, utamanya pajak bumi dan bangunan.*

**Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.wb*

Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH". Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya didunia dan diyaumul qiyamah nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang memberikan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehat, didikan, pelajaran hidup, doa, hingga anaknya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Cinta pertamaku dan pintu surgaku, Ayahanda Bangun Surya Dharma Pulungan (Dadang) dan Ibunda tercinta Nursida, terima kasih untuk doa yang senantiasa ayah dan ibu haturkan disetiap sujud shalat lima waktunya. ayah dan ibu adalah satu alasan penulis untuk terus berjuang dan semangat sehingga sampai dititik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kusim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si.Ak sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan, masukan dan saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  9. Bapak Dr. Muhammad April, S.H.,M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  10. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang dari 3 (tiga) tahun perkuliahan.
  11. Seluruh Pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
  12. Saudara/i Ruli Bertuah, Julaida S.Pd dan Kariyani terima kasih telah memotivasi dan mendukung segala keputusan penulis, sehingga penulis sampai dititik yang berbahagia ini.
  13. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 April 2024  
Penulis,

**APRIZA SAPITRI**  
**NIM. 02170623743**



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Lokasi Penelian.....	5
1.5.2 Waktu Penelitian .....	6
1.5.3 Jenis Data .....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.6 Analisis Data .....	7
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>	
2.1 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	9
2.2 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	9
2.3 Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	12
2.4 Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	13
2.5 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	15
2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	16
2.8 Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	16

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori .....	21
3.1.1 Pengertian Pajak .....	21
3.1.2 Fungsi Pajak.....	21
3.1.3 Jenis Pajak .....	22
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
3.1.5 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	26
3.1.6 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
3.1.7 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
3.1.8 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	29
3.1.9 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan .....	30
3.1.10 Kontribusi.....	33
3.1.11 Pendapatan Asli Daerah .....	34
3.1.12 Pajak dalam Islam .....	35
3.2 Tinjauan Praktek .....	38
3.2.1 Tinjauan Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan .....	41
3.2.2 Kendala yang Dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	42
3.2.3 Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan .....	43



## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan dan Saran.....	45
4.2 Kendala dan Saran.....	46

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2022.....	3
Tabel 3.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020.....	39
Tabel 3.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 .....	39
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 .....	39
Tabel 3.4	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2022 .....	41

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan .....	15
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang diterima Negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dana pajak hampir dialokasikan kesetiap sektor, salah satu sektor yang dialokasikan menggunakan dana pajak adalah dana intensif yang diberikan kepada setiap daerah. Dana tersebut yang akan digunakan oleh setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Menurut Dr.Rochmat Soemitro, dalam bukunya Siti Resmi (2017:1) yang dimaksud dengan pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun yang termasuk kedalam pajak pusat yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan secara umum adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya yang termasuk kedalam pajak provinsi yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dan yang termasuk kedalam pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi adalah sumbangan atau pemberian yang ditujukan kepada satu kelompok. Kontribusi pendapatan pada suatu instansi pemerintah memegang peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki manfaat sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan pemerintah.

Akan tetapi terdapat permasalahan yang dialami oleh daerah, pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**  
**Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	16.050.000.000,00	17.950.328.604,00	2.197.860.174,00	111,84 %
2.	2021	24.000.000.000,00	20.119.500.019,00	2.169.171.415,00	83,83%
3.	2022	28.000.000.000,00	22.627.740.986,00	2.508.240.967,00	80,81%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan atau pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada setiap tahunnya terdapat peningkatan, akan tetapi jika dilihat dari segi target yang harus dicapai, penerimaan atau pendapatan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pelalawan tersebut belum optimal, dan itu bisa dilihat dari persentase pada table diatas.

Mengingat betapa pentingnya kontribusi pajak daerah pada suatu instansi pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis tertarik dan perlu membahas lebih jauh mengenai seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian penulis tertarik dengan mengambil judul **“KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Mendapatkan tambahan pengalaman meneliti yang bermanfaat dan dapat mengaplikasikan materi yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan mempersembahkan hasil karya yang berkualitas.

### 2. Bagi Akademika

Penulisan ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan informasi tentang seberapa besar kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

### 3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sederhana dalam mengambil kebijakan yang tepat sehubungan dengan upaya peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang beralamat di jalan Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Kec.Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November sampai bulan Desember 2023

### 1.5.3 Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepala bidang pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara/Interview

Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan khususnya kepala bidang pajak bumi dan bangunan yang dianggap mampu.

#### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru

yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lainnya.

#### 1.6 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan situasi maupun kondisi yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

#### 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, jenis, sistem pemungutan, pengertian pajak bumi dan bangunan, dasar hukum, subyek dan obyek, pengertian pendapatan asli daerah, pajak menurut islam, cara menghitung pajak bumi bangunan dan tinjauan praktek.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Adapun perusahaan/instansi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Penulis ditempatkan di bagian sub bidang pajak reklame, pendataan, dan penagihan.

#### 2.2 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta diperjelas melalui pasal 46 peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwasannya pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat, dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Dalam perjalanannya susunan organisasi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Pelalawan mengalai beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran tugas dan fungsi dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD merupakan badan daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian, dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Dearah, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer.
  - b. Subbidang Inforasi Keuangan Daerah.
  - c. Kelompok jabatan Fungsional.
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Penerimaan dan Pengeluaran.
  - b. Subbidang Belanja PPKD.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Akuntansi dan Pembukuan.
  - b. Subbidang Bina Keuangan.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas :
  - a. Subbidang Verifikasi dan Penetapan.
  - b. Subbidang Pelayanan dan Pelaporan PAD.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Penagihan,Keberatan dan Banding, terdiri atas:
  - a. Subbidang penagihan PBB dan BPHTB.
  - b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
  - c. Subbidang Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding.
7. Bidang Aset, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
  - b. Subbidang Inventrisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### 2.3 Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

#### Kabupaten Pelalawan

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan instansi secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 2026 ditetapkan visi **"Inovasi menuju pelalawan Maju (Makmur, Adil, Jaya, Unggul)"**

## 2.4 Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

### Kabupaten Pelalawan

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan dan merealisasikan visi dimaksud, maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman.
2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi).
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur).
4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya).
5. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan pemerintan yang humanis (Good Public Srvices) berbasis data dan teknologi informasi (Maju Pemerintahan).

## 2.5 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

### Kabupaten Pelalawan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD secara berkesinambungan sasarnya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

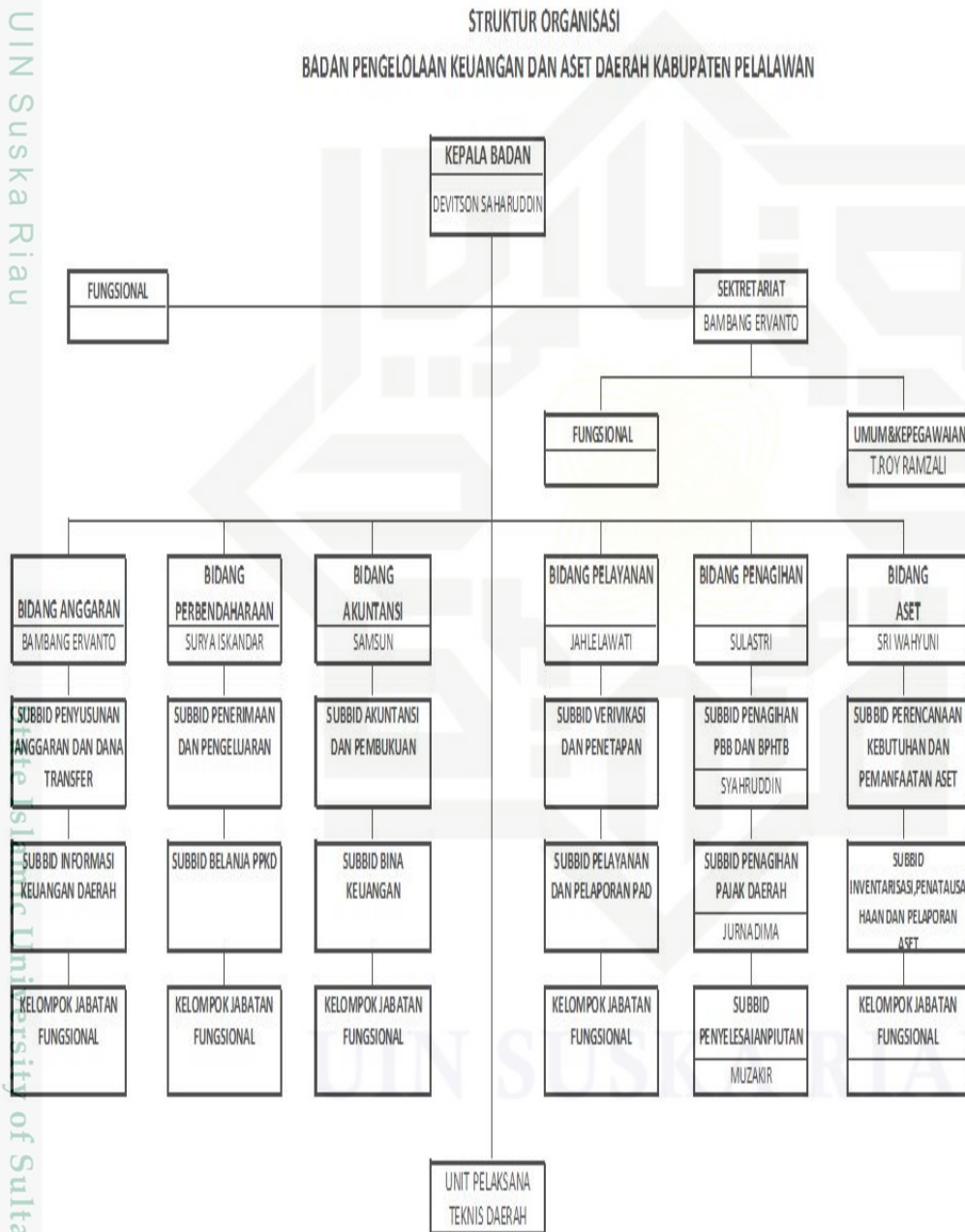
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.6 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

### 1. Tugas

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

### 2. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan badan, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

## 2.8 Uraian Tugas (*Job Description*) Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

### a. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrass koordinasi, faolitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait

perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Sekretariat terdiri dan 2 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bagian umum dan kepegawauan
2. Kelompok jabatan fungsional

**b. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah**

Bidang anggaran dan informasi keuangan daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran dan dana transfer, pelaksanaan anggaran dan informasi keuangan daerah. Bidang anggaran dan informasi keuangan daerah terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer.
2. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.
3. Kelompok jabatan Fungsional.

**c. Bidang Perbendaharaan**

Bidang perbendaharaan menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan pengeluaran, verifikasi dan pelaporan serta belanja PPKD.

Bidang perbendaharaan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran.
2. Sub Bidang Belanja PPKD.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan**

Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penetausahaan keuangan, akuntansi dan pembukuan serta bina keuangan.

Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan terdiri 3 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan.
2. Sub Bidang Bina Keuangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**e. Bidang Pendataan Dan Pelayanan Pajak Daerah**

Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan kebijakan dibidang pendataan dan pengawasan, verifikasi dan penetapan serta pelayanan dan pelaporan PAD.

Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan.
2. Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding**

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan PBB Dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPHTB, penagihan Pajak daerah lainnya dan penyelesaian piutang, keberatan dan banding.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding terdiri dari 3 Sub

Bidang yaitu:

1. Sub Bidang penagihan PBB dan BPHTB.
2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
3. Sub Bidang Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding

#### g. Bidang Aset

Bidang Aset menyeenggarakan tugas yang terkait dengan menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset, inventarisasi, penatausahaan dan pelaporan penilaian. Pengamanan dan penghapusan aset.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
2. Sub Bidang Inventrisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

#### h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional badan. Unit Pelaksana Teknis Daeah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:





1. Pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya.
2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

#### **i. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jhjang jabatan fungsional masing-masing.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada tinjauan praktek, penulis dapat menarik kesimpulan akan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan:

1. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan selama 3 tahun belakangan disetiap tahunnya mengalami penurunan dan belum ada yang mencapai target 100%. Pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebesar 26,44%, kemudian ditahun 2021 sebesar 26,15%, penurunan tersebut berlanjut ditahun 2022, dimana kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 20,14 %. Penurunan ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang lalai akan kewajibannya untuk membayar pajak, utamanya pajak bumi dan bangunan.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah, kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan tugasnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keterlambatan pencatatan yang mengakibatkan munculnya Nomor Objek Pajak (NOP) ganda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengadakan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengnonaktifkan nomor objek pajak atau beralih fungsi menjadi Fasilitas Umum (Fasum). Program jemput bola, mengutus 2 petugas pada setiap desa untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penghapusan denda dengan regulasi dan dasar hukum agar Wajib Pajak dapat membayar pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi beberapa saran yang mungkin dapat memberikan masukan, antara lain :

1. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan meningkatkan kinerja dengan cara membentuk petugas pajak disetiap kelurahan atau desa, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan utamanya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun berikutnya diharapkan dapat mencapai targer 100%.
2. Untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak (WP) diberbagai daerah yang ada di kabupaten pelalawan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surat At-Taubah ayat 29

Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Ilyas, Wirawan B. 2010. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Salemba Empat, Jakarta Selatan.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Siahaan, Marihot P. 2016, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-6278/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 02 November 2023 M  
 Sifat : Biasa 18 Rabiul Akhir 1445 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada  
 Yth. **Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

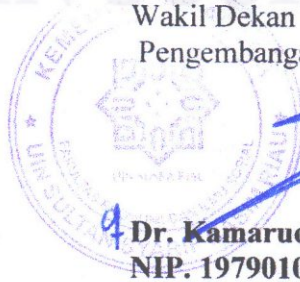
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Apriza Sapitri
NIM	: 02170623743
Jurusan	: DIII Adm Perpajakan
Semester	: V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan:

Hak Cipta Diinstitusikan  
 1. Daftarkan dengan menggunakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

B-6589/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023

Pekanbaru, 16 November 2023 M

3 Jumadil Awwal 1445 H

Biasa

Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
D  
i Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Apriza Sapitri  
NIM. : 02170623743  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mulyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2001





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60620  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-6589/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Tanggal 16 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

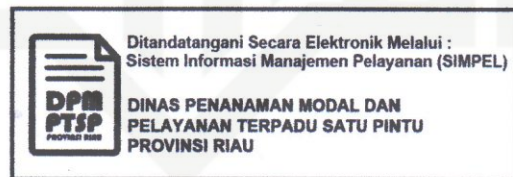
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>APRIZA SAPITRI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 02170623743  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN  |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 November 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**

**Nomor : 504/DPMPSTP/2023/0166**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari Dpmptsp Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/dpmpstp/non izin-riset/60620 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

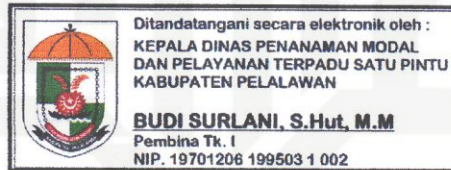
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : <b>APRIZA SAPITRI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 2170623743  |
| 3. Program Studi     | : Administrasi Perpajakan   |
| 4. Jenjang           | : DIII  |
| 5. Alamat            | : Desa tambak   |
| 6. Judul Penelitian  | : Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 7. Lokasi Penelitian | : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 4 Desember 2023



**Tembusan :**

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN  
 Telp./Fax. (0761) 493776 - PANGKALAN KERINCI  
 Email : bpkad.pelalawankab@gmail.com

Kode Pos 28300

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : 800 / BPKAD / 2023 / 1022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, SKM, M.Kes  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRIZA SAPITRI  
 NIM : 02170623743  
 Jurusan : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Maksud : bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan terhitung sejak tanggal 28 November 2023 s.d 27 Desember 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 27 Desember 2023  
 14 Jumadil Akhir 1445

an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Secretaris  
  
 SRI WAHYUNI, SKM, M.Kes  
 Pembina  
 NIP. 19760203 200003 2 001



## Lampiran

### DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Bidang Ibu Sulastri dan Bapak Saharuddin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Apriza Sapitri, lahir di Tambak 01 April 2003, merupakan anak ke empat dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Bangun Surya Darma Pulungan (Dadang) dan Ibunda Nursida. Penulis mengawali pendidikan di TK Putri Tujuh tahun 2008-2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 002 Tambak pada tahun 2009-2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Langgam pada tahun 2015-2018, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Langgam pada tahun 2018-2021, penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau dengan mengambil Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci, dimulai bulan Juni-Agustus 2023. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau, maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Pada Badan Pngelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.